

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif mereka sendiri dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom merupakan wilayah yang memiliki batas tertentu dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi mereka, tetapi tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun otonomi daerah telah diberikan kepada kabupaten dan kota, namun belum memberikan dampak yang signifikan dalam kemajuan pembangunan nasional karena adanya hambatan-hambatan, salah satunya adalah ketidakmerataan pembangunan di desa-desa yang ada dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan otonomi yang lebih luas dan lebih dekat dengan masyarakat untuk mengatasi masalah tersebut. Saat ini, pemerintah Indonesia tengah berusaha meningkatkan pelaksanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan mencapai keseimbangan pembangunan antara desa dan kota. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan dan pembuatan regulasi yang memberikan peluang bagi pertumbuhan usaha kecil dan mikro. Penting bagi kemajuan ekonomi tidak hanya berfokus pada wilayah perkotaan, tetapi juga harus merata sampai ke wilayah pedesaan. Salah satu cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di pedesaan adalah dengan mengembangkan BUMDesa atau Badan Usaha Milik Desa. (Ariska et al., 2023)

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka (6) menyatakan BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Kehadiran BUMDesa dikatakan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan mencegah migrasi penduduk dari desa ke kota. Indikator keuangan BUMDesa di Provinsi Bali menunjukkan peningkatan penjualan, peningkatan modal, dan kinerja yang baik. (Sinarwati & Prayudi, 2021). Sebagai lembaga keuangan desa yang bergerak di bidang bisnis keuangan, BUMDesa bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan usaha mikro yang dijalankan oleh pelaku ekonomi desa. Untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi, BUMDesa harus membuat laporan keuangan untuk setiap unit usahanya setiap bulannya. Selain itu, BUMDesa juga wajib memberikan laporan perkembangan unit usahanya kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa setidaknya dua kali dalam setahun. Laporan keuangan ini merupakan bagian dari pelaporan keuangan secara keseluruhan. Laporan keuangan memberikan informasi yang relevan tentang posisi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama periode pelaporan tertentu. (Sukriani et al., 2018)

Secara umum, laporan keuangan BUMDesa tidak jauh berbeda dengan laporan keuangan lembaga lainnya. Laporan keuangan digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan BUMDesa selama periode tertentu. Biasanya, laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba/rugi, dan laporan perubahan modal. Dalam penyajian laporan keuangan, penting untuk diingat bahwa banyak pihak yang mengandalkan informasi dalam laporan tersebut. Oleh karena itu,

informasi keuangan dalam laporan harus bermanfaat bagi para pengguna. Informasi akan bermanfaat jika dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna. Maka dari itu laporan keuangan yang dihasilkan oleh BUMDes harus memiliki kualitas yang bagus dimana harus terdapat kriteria dan unsur-unsur yang membentuk kualitas laporan keuangan termasuk relevansi, keandalan, kemampuan untuk dibandingkan, dan kemampuan untuk dipahami.

Di Provinsi Bali, perkembangan BUMDesa setiap tahun terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh upaya Pemerintah Provinsi Bali yang menargetkan bahwa setiap desa di Bali memiliki BUMDesa. Salah satu kabupaten di provinsi Bali yaitu kabupaten Buleleng memiliki Perkembangan BUMDesa yang cukup pesat, Kabupaten Buleleng memiliki 9 Kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 129 desa yang dimana hampir disetiap desa tersebut sudah memiliki BUMDesa. Dilansir dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng. Berikut merupakan data BUMDesa yang ada di Kabupaten Buleleng.

Tabel 1.1
Data BUMDesa Se-Kabupaten Buleleng

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah BUMDesa
1	Tejakula	10	10
2	Kubutambahan	13	13
3	Sawan	14	14
4	Buleleng	12	12
5	Sukasada	13	11
6	Banjar	17	17
7	Seririt	21	19
8	Busungbiu	15	14
9	Gerokgak	14	13
Total		129	125

Sumber: DPMdD Kab. Buleleng (2023)

Kecamatan Banjar memiliki 17 desa dengan 17 BUMDesa yang semuanya berjalan aktif. Meski demikian masalah yang terkait dengan laporan keuangan BUMDesa merupakan topik yang menarik untuk diteliti. Karena pada kenyataannya, masih ada BUMDesa yang tidak sehat dan kasus penyimpangan yang berhasil ditemukan. Selain itu, pengembangan dan pengelolaan BUMDesa juga kurang optimal. Hal ini menyebabkan kerugian yang signifikan dan menghambat operasional BUMDesa (Cahyani & Atmadja 2023). Untuk mengatasi hal tersebut BUMDesa perlu memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti kemampuan sumber daya manusia, penyebab permasalahan tersebut antara lain adalah data yang disajikan dalam laporan keuangan BUMDesa tidak sesuai, seperti kesalahan pencatatan dan kurangnya ketelitian dari sumber daya manusia. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan pada laporan keuangan BUMDesa itu sendiri. Selain itu, pelatihan yang diadakan juga terbatas, terutama yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi baik atau buruknya kualitas laporan keuangan BUMDesa adalah sistem pengelolaan keuangan. Abdul dalam Hidayat mengungkapkan bahwa kinerja keuangan dalam menunjukkan kualitas pengelolaan keuangannya itu dipengaruhi oleh sistem pengelolaan keuangan itu sendiri (Hidayat, 2015) karena laporan keuangan dibuat berdasarkan data dan informasi keuangan yang dihasilkan dari proses pengelolaan keuangan tersebut. Jika pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik, maka data dan informasi yang digunakan dalam laporan keuangan akan akurat, lengkap, dan terpercaya. Sebaliknya, jika pengelolaan keuangan tidak optimal, kemungkinan terjadinya kesalahan atau ketidakseimbangan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan akan

lebih tinggi. Hal ini dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak dapat dipercaya. Penelitian terkait pengaruh sistem pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan hasil yang berbeda pada penelitian Vidyasari (2021) sistem pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2023) menyatakan bahwa sistem pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2023) menunjukkan bahwa bahwa pengelolaan keuangan daerah memiliki hubungan yang positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Kepatuhan terhadap standar akuntansi juga merupakan faktor yang penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Jika BUMDesa menerapkan standar akuntansi dengan benar dan konsisten, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan menjadi lebih akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Indonesia, standar akuntansi yang umumnya digunakan untuk menyusun laporannya adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP adalah standar akuntansi yang disusun khusus untuk entitas dengan karakteristik kecil dan sedang, termasuk BUMDes. Standar akuntansi memberikan pedoman yang jelas dalam mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi keuangan, sehingga dapat memastikan konsistensi dan keseragaman dalam pelaporan keuangan. Kepatuhan ini akan memastikan bahwa laporan keuangan BUMDesa mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan memberikan

informasi yang berguna bagi pengguna laporan. Penelitian yang dilakukan oleh Saputra Dkk (2022) menunjukkan bahwa kepatuhan standar akuntansi, berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan individu dalam suatu organisasi atau sistem untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif dan efisien. Semakin baik kualitas sumber daya manusia, semakin baik juga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas sumber daya manusia yang rendah juga menjadi faktor penyebab masalah. Untuk itu, penting bagi pegawai yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemampuan sumber daya manusia yang kompeten akan memungkinkan mereka menyelesaikan pekerjaan dengan efisiensi dan efektivitas. Kapasitas sumber daya manusia juga dapat dilihat dari kemampuannya untuk mencapai kinerja yang menghasilkan output dan outcome yang diharapkan. Kualitas sumber daya manusia dapat diukur dari tingkat pengetahuan yang dimiliki. Semakin kuat pengetahuan individu, semakin kuat juga tanggung jawab dan daya saing dalam melaksanakan tugas. (Sandi et al., n.d.). Penelitian yang dilakukan oleh Astari (2023) dan Hanifah (2023) menunjukkan hasil bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Machmudiyanti (2023) menunjukkan hasil bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Khoirunisa et al., n.d.) tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan

bundes di wilayah Kecamatan Karangrejo. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti menggunakan variabel independen yaitu sistem pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap standar akuntansi dan kualitas sumber daya manusia, sementara penelitian sebelumnya berfokus pada kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. Kemudian perbedaan lainnya yaitu objek penelitian ini adalah BUMDesa di Kecamatan Banjar, sementara penelitian sebelumnya melakukan penelitian pada BUMDesa di wilayah Kecamatan Karangrejo.

Penelitian ini difokuskan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) karena lembaga pengkreditan desa dan koperasi yang ada masih beroperasi, meskipun beberapa permasalahan mungkin timbul, namun dapat diatasi dengan baik. Penentuan variabel di dasarkan pada observasi dan wawancara awal yang saya pada lakukan pada BUMDesa Sari Sedana Desa Sidetapa dengan partisipasi dari Ibu Mareni selaku Bendahara dan Ibu Suryanita selaku sekretaris dimana menemukan kendala pada sistem pengelolaan keuangan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi dimana ketidaksesuaian sistem dengan kebutuhan, dan ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi bisa menjadi masalah seperti kesalahan pencatatan, keterlambatan pelaporan, atau penyajian informasi yang tidak akurat dalam laporan keuangan. Kemudian kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai dapat merusak kualitas laporan keuangan. Kendala seperti kurangnya pengetahuan, keterbatasan pengalaman, kesulitan dalam mengelola teknologi, kurangnya kepatuhan terhadap prosedur internal, dan kurangnya komunikasi antardepartemen bisa menjadi masalah. Ini dapat mengakibatkan kesalahan pencatatan, ketidakakuratan informasi, atau kesulitan dalam interpretasi data keuangan. Hal ini

dikatakan langsung oleh pengurus BUMDesa yang mana hal ini akan memberikan pengaruh terhadap laporan keuangan yang akan dihasilkan. Dan tempat penelitian dilakukan pada BUMDesa Kecamatan Banjar karena pada observasi awal terdapat beberapa BUMDesa yang mengalami permasalahan di laporan keuangannya. Berikut beberapa permasalahan yang ada pada BUMDesa di Kecamatan Banjar.

Dilansir dari (www.wartabali.com) pada tahun 2019 ditemukan Penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tirtasari Kecamatan Banjar. Hal ini mengakibatkan Sejumlah aparat desa bahkan Ketua BPD Tirtasari dipanggil untuk memberikan keterangan dan data kepada penyidik, terkait dugaan penyimpangan dana BUMDesa Sadu Amerta Desa Tirtasari Kecamatan Banjar. Permasalahan tidak hanya terjadi pada BUMDesa tersebut, tetapi ada juga beberapa BUMDesa yang mengalami permasalahan. Seperti BUMDesa Mekar Laba yang ternyata BUMDesa tersebut tidak melakukan penyetoran tabungan kepada para nasabah dan digunakan oleh oknum pengurus yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah (<http://www.baliexpress.com/>). Permasalahan dugaan penyimpangan dana BUMDesa Sadu Amerta dan BUMDesa Mekar Laba, memiliki kaitan yang erat dengan kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas merupakan cerminan transparansi dan akurasi dalam mencatat semua transaksi keuangan BUMDesa, termasuk penggunaan dana yang sesuai dengan anggaran yang telah disetujui. Ketika terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana, hal ini kemungkinan akan tercermin dalam laporan keuangan yang tidak akurat atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Selain itu, laporan keuangan yang baik juga memungkinkan pihak terkait untuk memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan BUMDesa secara teratur, serta memastikan kepatuhan terhadap

hukum dan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan BUMDesa memainkan peran penting dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan dana, serta menjaga akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan keuangan BUMDesa. Selain itu, pada BUMDesa Sari Sedana di Desa Sidetapa setelah dilakukan wawancara dengan ketua BUMDesa Bapak I Made Tama menjelaskan bahwa masih terdapat karyawan BUMDesa yang merangkap sebagai bendahara dan sekretaris BUMDesa. Seperti bendahara BUMDesa yang biasanya juga membantu dibagian toko hal itu menyebabkan sering terjadi kesalahan pencatatan. Tidak hanya itu terkadang sebagai ketua beliau juga biasanya langsung membantu dalam membuat laporan keuangan.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti pengaruh sistem pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap standar akuntansi dan kualitas sumber daya manusia terhadap permasalahan yang terjadi pada BUMDes terkait kualitas laporan keuangan. Adapun judul yang diambil yaitu **“Pengaruh sistem pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap standar akuntansi dan kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan (Studi Kasus Pada BUMDesa di Kecamatan Banjar)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi pada BUMDes di Kecamatan Banjar sebagai berikut

1. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan BUMDesa

2. Pengelolaan keuangan pada bumdes belum dilakukan secara optimal
3. Kurangnya pemahaman terhadap standar akuntansi yang mengakibatkan dampak negatif pada kualitas laporan keuangan
4. Rendahnya sumber daya manusia sehingga ada karyawan yang merangkap dalam mengambil pekerjaan

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan Masalah yang diberikan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebatas meneliti pengaruh dari sistem pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap standar akuntansi dan kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan BUMDesa dengan objek penelitiannya yakni BUMDesa yang ada di seluruh Kecamatan Banjar.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah sistem pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah kepatuhan terhadap standar akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah didapatkan oleh penulis maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan terhadap standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan?

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang sekiranya dapat diberikan oleh hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan juga pemahaman teoritis mengenai Kualitas Laporan Keuangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi khususnya pada BUMDesa. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan atau berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada mata kuliah terkait khususnya di jurusan Ekonomi maupun Akuntansi. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi untuk lebih memahami tentang kualitas laporan keuangan serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi BUMDesa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada BUMDesa mengenai pengaruh dari system pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap standar akuntansi dan kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDesa.

2. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan penulis mengenai pengaruh dari kualitas laporan keuangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya terkhususnya faktor sistem pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap standar akuntansi dan kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDesa.

3. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi penelitian-penelitian sejenis kedepannya serta diharapkan dapat memperdalam pengetahuan pembaca mengenai Akuntansi dalam hal kualitas laporan keuangan.